IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER YANG BERKEPASTIAN HUKUM

Farra Adiba S¹, Yovita Arie Mangesti²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: sifarra20@gmail.com, yovitaam@untag-sby.ac.id

Abstract

A license to practice complementary traditional medicine is the granting of a license to an individual or entity that establishes a health service facility. Everyone who provides complementary traditional medicine services is required to have a practice license. This legal research aims to determine the regulation regarding the license to practice complementary health workers in providing health services in the field of complementary traditional health. The type of research used is normative legal research. The approach used is using the legal approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). Based on this research, shows that the regulation of the practice of complementary traditional health workers refers to the Minister of Health Regulation Number 15 of 2018 concerning the Implementation of Complementary Traditional Medicine. Independent practice must have a practice permit marked by having STRTKT and SIPTKT. As for the agency that establishes (Griya Sehat), it must have an operating permit, where the permit is granted by the district/city health office. On the other hand, with a legal practice permit, traditional complementary health services can be accounted for their benefits and safety so that a health worker can be held accountable for the services provided. In this case, the Government must also regulate and supervise the safety, interests, and protection of clients.

Keywords: *health workers, license to practice, complementary traditional medicine*

Abstrak

Izin praktik pengobatan tradisional komplementer merupakan izin yang diberikan pada seseorang ataupun badan yang melakukan pendirian sarana pelayanan kesehatan. Tiap pihak melakukan penyelenggaraan pelayanan pengobatan tradisional komplementer wajib mempunyai izin praktik. Penelitian hukum ini memiliki tujuan untuk melihat aturan berkenaan dengan izin praktik tenaga kesehatan komplementer untuk melayani di bidang kesehatan tradisional komplementer. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang di gunakan yakni menggunakan metode pendekatan perundangan dan konseptual yang. Dari penelirian ini diperoleh bahwa pengaturan izin praktik tenaga kesehatan tradisional komplementer merujuk pada Permenkes Nomor 15 Tahun 2018 berkenaan dengan Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Komplementer. Praktik mandiri harus memiliki izin praktik yang ditandai dengan memiliki STRTKT dan SIPTKT. Sedangkan untuk badan yang mendirikan (griya sehat), hendaknya memiliki izin untuk menyelenggarakan, dimana izin tersebut diberikan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. Di sisi lain, dengan adanya izin praktik secara hukum, maka pelayanan kesehatan tradisional komplementer dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya agar seorang tenaga kesehatan dapat memperpertanggungjawabkan pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini Pemerintah juga harus mengatur dan mengawasi demi keamanan, kepentingan, serta perlindungan klien.

Kata Kunci: tenaga kesehatan, izin praktik, kesehatan tradisional komplementer

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan kebutuhan setiap manusia dan merupakan hak konstitusional yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945 Pasal 28 huruf H ayat (1) yang secara tegas mengatur bahwa: *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*. Hak atas pelayanan kesehatan ialah sebuah bentuk dari upaya memenuhi hak asasi manusia khususnya berkenaan dengan layanan kesehatan. Hak tersebut menjadi hal mendasar yang hendaknya dimiliki oleh tiap warga negara Indonesia sehingga tiap masyarakat mampu melaksanakan pengobatan (Heriani and Munajah 2020) .

Pengobatan yang ada di masyarakat pada saat ini berupa pengobatan konvensional dan pengobatan tradisional komplementer. Meskipun keduanya mempunyai pelayanan yang tidak sama namun tujuannya sama yakni memberi layanan kesehatan kepada klien. Perkembangan pengobatan tradisional komplementer akhir-akhir ini menjadi perhatian di banyak negara terutama di Indonesia, hal ini menjadi pilihan pengobatan alternatif bagi masyarakat. Dimana pada saat ini masyarakat menginginkan pelayanan yang sejalan dengan apa yang dipiih, sehingga jika keinginannya sudah dipenuhi maka akan memberikan dampak pada adanya rasa puas. Hak tersebut menjadikan sebuah peluang bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan peranan yakni memberi terapi komplementer (Adi and others 2022). Terdapat beberapa yang memberikan dampak bagi seseorang dalam melakukan pemilihan, pengobatan tradisional komplementer yakni diantaranya faktor social, ekonomi, budaya, psikologis, kejenuhan pada layanan medis atau pengobatan konvensional, faktor manfaat serta keberhasilan, dan penyakit (Suwito and others 2020).

Pengobatan tradisional komplementer (*Traditional&Complementary Medicine/T&CM*) menjadi perhatian para pakar kesehatan. Organisasi kesehatan dunia, *World Health Organization* (WHO) mengikuti pengembangan pengobatan tradisional dan melakukan peneribatan praktik pada bidang pengobatan tradisional (World Health Organization 2019). Pengobatan komplementer menjadi salah satu bagian penting dalam pelayanan kesehatan dunia. WHO juga memberikan rekomendasi untuk menggunakan pengobatan tradisional dalam memelihara kesehatan masyarakat serta memberikan

dukungan dalam meningkatkan keamanan. Pelayanan kesehatan tradisional merupakan salah satu alternative atau pelengkap guna dilakukan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional sesuai rekomendasi dari WHO tahun 2014-2023 (Nurhayati and others 2020) .

Pelayanan kesehatan tradisional tertuang dalam aturan perundangan, yakni Pasal (61) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Artinya pemerintah dalam melaksanakan tugasnya yakni melakukan pengaturan serta pengawasan pelayanan kesehatan tradisional berdasar pada keamanan, kepentingan, serta perlindungan masyarakat. Terkait tentang pengaturan pelayanan kesehatan tradisional di Indonesia terdapat di dalam dalam Pasal 1 ayat (16) UU Kesehatan. Dengan ditetapkannya aturan berkenaan dengan layanan kesehatan tradisional dalam UU Kesehatan, maka peraturan tersebut menjadi komitmen yang dimiliki pemerintah dan berkewajiban dalam melindungi layanan kesehatan tradisional

Ketentuan mengenai pengobatan tradisional komplementer diatur di dalam Permenkes No. 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Komplementer (Permenkes Yankestrad Komplementer). Definisi berkenaan dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) Permenkes Yankestrad Komplementer. Aturan tersebut memiliki tujuan yakni sebagai bentuk pembinaan tenaga kesehatan pengobatan tradisional komplementer dalam melindungi masyarakat, melakukan inventarisasi jumlah pengobatan tradisional serta jenis dan prosedur pengobatan yang ditetapkan (Ajeng and others 2018).

Pelayanan kesehatan tradisiona menjadi sebuah bentuk pelayanan yang sudah ada sejak dahulu di Indonesia bahkan sebelumnya pengobatan modern ada. Dalam PP No. 103 Tahun 2014 berkenaan dengan layanan kesehatan Tradisional dapat terselenggara dan bertanggung jawab pada manfaat keamanan dan juga kualitas dan pelayanan sehingga mendapatkan perlindungan untuk melakukan pemilihan jenis layanan kesehatan tradisional yang selaras dengan apa yang dibutuhkan. Pelayanan keseharan dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki kompetensi dengan keahlian (Nurhayati and others 2020).

Pelayanan kesehatan tradisional sudah mendapatkan pengakuan keberadaannya sejak dahulu dan dipergunakan oleh masyarakat dalam rangka mencegah, melakukan pemeliharaan, dan peningkatan kesehatan, penyembuhan, dan memulihkan, sampai dengan

kini terus terjadi perkembangan pelayanan kesehatan yang sejalan dengan perkembangan teknologi disertai dengan mendorong meningkatkan penggunaan seperti kesehatan tradisional komplementer yang mana pada saat ini masyarakat menyukai hal yang sifatnya alami (Kartika 2019) .

Pelayanan kesehatan menjadi suatu hubungan sosial antara pengobatan tradisional komplementer dengan klien. Definisi klien tertera dalam Pasal 1 ayat (5) Permenkes Yankestrad Komplementer, dimana istilah klien digunakan untuk menyebut orang yang datang untuk menggunakan jasa pelayanan kesehatan tradisional komplementer.

Tiap tenaga kesehatan tradisiona dalam melaksanakan penyelenggaraan layanan keseharan komplementer hendaknya melaksanakan system rujukan yang mana system ini dilaksanakan berdasar pada tersedianya kemampuan, kewenangan atau prasarana yang ada. Tiap rujukan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan tradisional hendaknya memperoleh persetujuan dari pihak klien (Nurhayati and others 2020) .

Pada beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai tema yang serupa dengan penulis, yang pertama yakni penelitian jurnal oleh Istiana Heriani dan Munajah dengan judul “Aspek Legalitas Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia” fokus penelitiannya terdapat pada perbedaan perlindungan bagi penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional (Heriani and Munajah 2020). Kedua yakni penelitian oleh Lavenia Rarung dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Pembuat Obat-Obatan Tradisional Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” fokus penelitiannya terdapat pada tanggung jawab pelaku obat tradisional yang harus bertanggung jawab apabila klien mengalami kerugian (cedera fisik, hingga kematian) (Rarung 2017). Selanjutnya yakni penelitian jurnal yang ketiga oleh Sadewa Yudha Sukawati dengan judul “Implementasi Perizinan Pengobatan Herbal Dalam Upaya Kesehatan Masyarakat Di Kota Surakarta” fokus penelitiannya yakni terdapat pada pelaksanaan perizinan pengobatan herbal yang masih sangat sulit (Sadewa and others 2017) . Ketiga penelitian tersebut berbeda dengan fokus penelitian yang akan dikaji penulis yakni terkait dengan Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan Tradisional Komplementer Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengambil judul “Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Komplementer Yang Berkepastian Hukum”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis mempergunakan penelitian hukum normative yang dapat dimaknai dengan sebuah proses dalam mendapatkan sebuah aturan hukum, berbagai prinsip hukum, ataupun berbagai doktrin hukum. Pemahaman akan penelitian tersebut, merupakan pedoman bagi penulis dan dipergunakan untuk membangun dan menjawab isu hukum yang sedang dihadapi yakni tentang izin praktik tenaga kesehatan tradisional komplementer, serta untuk memberikan penjelasan secara sistematis mengenai kesehatan tradisional komplementer (Marzuki 2010).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aturan Tentang Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Komplementer

Pelayanan kesehatan tradisional dimulai dengan penggunaan berbagai jenis serta cara yang beracuan pada pengalaman serta keterampilan empiris, sebagaimana norma agama serta budaya masyarakat yang pengembangannya dilaksanakan dengan cara yang ilmiah ataupun biomedis sementara praktiknya dan kompetensi yang dimiliki hendaknya bersumber dari lulusan tenaga kesehatan. Pengembangan layanan kesehatan tradisional komplementer dilakukan dengan tujuan agar produk kesehatan dan tenaga kesehatan dapat diterima, manfaatnya di dapat (Amperawati 2018). Perkembangan pengobatan tradisional komplementer akhir- akhir ini menjadi perhatian di banyak negara terutama di Indonesia, hal ini menjadi pilihan pengobatan alternatif bagi masyarakat. Dimana pada saat ini masyarakat menginginkan layanan yang sejalan dengan apa yang dipilih, sehingga jika apa yang dikehendaki sudah terpenuhi maka akan dirasakan dampak pada kepuasan. Hal tersebut memberi peluang pada tenaga kesehatan dalam melaksanakan peranan dan memberi terapi komplementer (Suminah C and Sisilia 2020).

Keberadaan pengobatan tradisional komplementer di Indonesia, diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 berkenaan dengan Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional (Kepmenkes Battrra). Selanjutnya Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 1109/Menkes/PER/IX/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer- Alternatif Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Kepmenkes Battrra- Alternatif). Tahun 2014, Pemerintah Republik Indonesia

menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (3) mengenai pelayanan kesehatan tradisional dalam UU Kesehatan, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, yang selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (PP Yankestrad) untuk merevisi Kepmenkes Battrra dan Kepmenkes Battrra- Alternatif, yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Kementerian Kesehatan kemudian mengeluarkan peraturan yang lebih spesifik mengenai kesehatan tradisional komplementer, yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Komplementer (Permenkes Yankestrad Kompementer), dimana peraturan tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan dalam upaya yang mempergunakan ilmu biomedis dan biokultural serta agar praktik kesehatan tradisional tidak dilakukan oleh sembarang orang. Permenkes Yankestrad Kompementer menutup kesempatan bagi pihak yang tidak berkeahlian dalam memperoleh izin dalam menjalankan praktiknya, sehingga layanan kesehatan tradisional komplementer hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang berwenang guna menjamin perlindungan bagi pengguna layanan kesehatan tradisional komplementer (Alam 2018) .

Pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan tradisional dilaksanakan oleh pemerintah sehingga dapat dipertanggung jawabkan kemanfaatan dan keamanannya serta diupayakan tidak bertolak belakang dengan norma agama. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan dapat pula dilimpahkan pada bupati ataupun walikota (Ifkar 2022).

UU kesehatan sudah menetapkan aturan pada pelayanan kesehatan tradisional melalui Pasal 59, 60 dan 61 yang mana ketiga pasal berisi aturan berkenaan dengan jenis layanan kesehatan tradisional, isi pada penggunaan peralatan dan teknologi dalam memberi layanan kesehatan dan terdapat pula adanya pengawasan. Karenanya dengan ditetapkannya aturan layanan kesehatan tradisional dalam UU ialah sebuah bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi pelayanan kesehatan tradisional (Heriani and Munajah 2020).

Permenkes Yankestrad Kompementer membagi cara merawat atau mengobati dalam memberikan layanan kesehatan tradisional komplementer yang dilakukan dengan

mempergunakan keterampilan, ramuan (tanaman herbal, hewan, mineral, sediaan sarian), kombinasi antara keterampilan dan ramuan (Adi and others 2022).

Standart layanan pengobatan tradisional dapat terlihat dari izin yang dimiliki badan pengobatan tersebut. Izin ialah ranah kewenangan dari pemerintah kota ataupun kabupaten yang tertuang dalam pasal 6 huruf d PP Yan kestrad. Izin tersebut memiliki makna bahwa pengobatan tradisional tersebut ahli dan kompeten pada bidang sebagaimana standart yang pemerintah tetapkan.

Tiap tenaga kesehatan tradisional hanya diperbolehkan untuk mempergunakan peralatan kesehatan tradisional sesuai dengan metode, kompetensi, serta kewenangan. Alat kesehatan tradisional hendaknya sesuai dengan syarat kualitas, keamanan, dan kemanfaatan. Tiap obat tradisional yang dipergunakan pada layanan kesehatan hendaknya aman, memiliki kualitas, dan memiliki manfaat (Bagiastra and Sudantra 2019) .

1. Izin Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan Tradisional Komplementer

Tenaga kesehatan tradisional komplementer merupakan tiap pihak yang melakukan pengabdian diri pada bidang kesehatan dan berpengetahuan dan berketerampilan melalui Pendidikan pada bidang kesehatan tradisional yang mempergunakan ilmu biomedis dan biocultural dalam pemaparannya serta manfaat dan juga keamanan yang dimiliki terdapat bukti ilmiah. Bagi beberapa jenis membutuhkan wewenangan dalam melaksanakan usaha kesehatan tradisional pada fasilitas kesehatan.

Tenaga kesehatan tradisional dalam praktiknya dilaksanakan mandiri dengan lingkup yang terbatas sebagaimana kompetensi layanan kesehatan tradisional ataupun 1 jenis metode. Tenaga kesehatan tradisional yang diakui oleh pemerintah adalah tenaga kesehatan tradisional yang telah mendapatkan perizinan berdasarkan Permenkes Yankestrad Komplementer. Dimana tenaga kesehatan harus memiliki STRTKT dan SIPTKT. Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional atau STRTKT merupakan suatu bukti yang tertu;os untuk memberi wewenang dalam melayani masyarakat dengan cara tradisional komplementer. SIPTKT merupakan bukti tertulis yang diberi pada tenaga kesehatan tradisional sehingga tidak membutuhkan izin dalam menyelenggarakan karena izin tersebut melekat pada SIPTKT.

Praktik tenaga kesehatan tradisional komplementer ialah bentuk layanan kesehatan tradisional sebagaimana Pasal 1 ayat (16) UU Kesehatan. Praktik mandiri yang hendaknya memenuhi syarat lokasi, bangunan, ruangan, dan lain sebagainya.

2. Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional (Griya Sehat)

Fasilitas Pelayanan kesehatan atau yang umum dinyatakan dengan Griya sehat yakni merupakan lokasi diselenggarakannya pelayanan kesehatan tradisional oleh tenaga kesehatan tradisional yang mana dalam penyelenggaraannya bertujuan untuk mencegah penyakit, meningkatkan derajat kesehatan, menyembuhkan, serta memulihkan kesehatan. Bukan hanya itu griya sehat ini memberi layanan kesehatan perseroangan yang sifatnya mendorong atau meningkatkan taraf hidup dengan keseimbangan kondisi fisik, mental, spiritual, social, serta kebudayaan berdasar pada ilmu kesehatan tradisional.

Griya sehat ialah fasilitas layanan kesehatan tradisional yang mana tenaga kesehatan yang terdapat fasilitas kesehatan di dalamnya setidaknya terdiri atas 2 orang tenaga tradisional profesi dan 1 tenaga vokasi. Keduanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan kompetensi serta wewenang.

Setiap griya sehat harus memiliki izin penyelenggaraan, dimana izin tersebut diberikan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dan izin penyelenggaraan. Griya sehat dapat dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat. Griya sehat yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Griya sehat yang dimiliki oleh masyarakat harus berbadan usaha atau berbadan hukum.

Kesesuaian dengan kriteria griya sehat yang menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan tradisional sudah mempunyai fungsi Pendidikan serta penelitian pada bidang kesehatan tradisional komplementer. Griya sehat digunakan sebagai fasilitas layanan kesehatan yang sejalan dengan aturan perundangan. Sementara bagi fungsi penelitian bidang kesehatan sejalan dengan aturan perundangan. Sementara bagi fungsi penelitian bidang kesehatan tradisional griya sehat dapat melakukan teknologi kesehatan tradisional. Pengembangan guna agar derajat kesehatan lebih maju.

Praktik griya sehat hendaknya mempunyai izin untuk menyelenggarakan praktik kesehatan yang diberikan oleh Lembaga yang memberi izin setidaknya 5 tahun dan dapat dilakukan perpanjangan kembali jika sudah memenuhi syarat. Dalam rangka memperoleh izin untuk menyelenggarakan griya sehat, pihak yang menyelenggarakan hendaknya melakukan pengajuan permohonan pada Lembaga yang memberi izin.

Tiap tenaga kerja tradisonal dalam melakukan usaha dalam memberi layanan kesehatan tradisional komplementer hendaknya dilaksanakan dengan system rujukan. System rujukan dilakukan dengan dasar tersedianya kemampuan, kewenangan, ataupun sarana dan prasarana yang ada. Tiap rujuka yang dilaksanakan hendaknya memperoleh persetujuan dari klien. Rujukan dapat dilaksanakan antar griya sehat, dengan prinsip berikut:

1. Tenaga kesehatan tradisional hendaknya merujuk pada fasilitas layanan kesehatan konvensional jika klien mengalami gawat darurat ataupun suatu penyakit tertentu yang mana jika pengobatan yang dilakukan terlambat akan menjadikan kondisinya semakin buruk dan semakin bahaya.
2. Penanganan yang dilakukan terbatas pada tindakan komplementer.
3. Berdasar pada persetujuan yang diberikan klien, tenaga media dapat melakukan rujukan pada tenaga kesehatan tradisional jika hendaknya mempergunakan layanan kesehatan tradisional sebagai komplementer pada pengobatan medis yang diberikan.
4. Dalam memberikan penanganan pada klien yang mendapatkan rujukan dari griya sehat, tenaga keseharan mendapatkan rujukan dapat melakukan komunikasi dengan tenaga kesehatan tradsonal berdasar pada kepentingan klien.

Berdasarkan penjelasan diatas praktik pelayanan pengobatan tradisonal memiliki tujuan untuk melakukan tunjangan atas penyelenggaraan kesejahteraan pada bidang kesehatan berdasar pada pemikiran tersebut maka hubungan keduanya dinyatakan dengan partnership. Artinya terdapat hubungan aktif serta saling memberikan dampak satu dengan lainnya.

Pelayanan kesehatan tradisional bagi tenaga kesehatan diatur didalam UU Kesehatan, dimana pemerintah memberi perlindungan bagi layanan kesehatan

tradisional. Akan tetapi meskipun belum terdapat aturan khusus berkenaan dengan bentuk perlindungan, akan tetapi hal tersebut dapat dinyatakan tidak terserat. Karenanya pihak yang memiliki kewenangan perlu melakukan pembelajaran lebih lanjut guna memperoleh penjelasan berkenaan dengan bagaimana melaksanakan perlindungan hukum berdasar fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pada tingkatan bahwa. Karenanya dibutuhkan pengalaman berkenaan dengan pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga pengobatan tradisional pada wilayah kabupaten ataupun kota yang mana pemerintah bertanggung jawab sebagai pihak yang diberikan amanat dalam menjalankan perlindungan hukum dan erat kaitannya dengan tenaga pengobatan tradisional.

Peraturan yang berlaku saat ini yang mengatur mengenai pelayanan kesehatan tradisional komplementer adalah Permenkes Yankestrad Komplementer. Dalam penyelenggaraan pengobatan tradisional komplementer dilakukan pembinaan serta pengawasan di bidang hukum kesehatan. Hal ini menjadi relevan karena tenaga kesehatan tradisional komplementer yang melakukan pekerjaan pada bidang kesehatan serta aturan yang isinya kewajiban untuk tindak pada perundangan kesehatan.

Penyelenggaraan pengobatan tradisional komplementer dalam melakukan pembinaan serta pengawasan di bidang hukum kesehatan sangat perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan agar penyelenggaraan layanan kesehatan harus dilakukan dengan penuh pertanggung jawaban dan terdapat perlingungan terhadap klien yang menggunakan pelayanan kesehatan komplementer. Oleh sebab itu penting dilakukan karena makin banyak masyarakat yang mempergunakan layanan kesehatan tradisional baik keterampilan maupun ramuan yang ada di Indonesia. Hukum kesehatan saat ini mengatur pelayanan kesehatan terhadap klien. Hal ini dilaksanakan dalam memperoleh derajat kesehatan yang tinggi dan sejalan dengan harapan, yakni dengan usaha kesehatan yang terpadu serta menyeluruh baik dengan usaha kesehatan perseroan ataupun masyarakat.

Hukum positif yang disebut juga *ius constitutum* ialah ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku pada saat, waktu, dan tempat tertentu. Hukum positif yang menjadi dasar pada tenaga kesehatan tradisional komplementer adalah Permenkes

Yankestrad Komplementer. Dengan adanya hal tersebut maka peraturan tentang praktik tenaga kesehatan tradisional komplementer harus didasarkan dalam nilai- nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang sebagaimana inti dari pembuatan dasar peraturan praktik tenaga kesehatan tradisional komplementer supaya aturan yang dibuat harus sesuai dengan pandangan serta cita hukum. Nilai-nilai yang ingin dicapai dengan regulasi praktik tenaga kesehatan tradisional komplementer. Sila Pancasila yang berkaitan dengan peraturan mengenai praktik tenaga kesehatan tradisional komplementer klien adalah sila kedua Pancasila yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”, di mana pada prinsipnya menandakan jika bangsa Indonesia adalah bagian dari kemanusiaan yang menjunjung besar atas hak asasi manusia serta meningkatkan tali persaudaraan dunia dengan bersumber pada nilai- nilai keadilan serta keadaban. Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib hukum yakni keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum, peraturan-peraturan hukum yang akan bertumbuh searah dengan perkembangan pergaulan hidup manusia. Kemajuan peraturan hukum dalam pelaksanaannya membuktikan terdapatnya pergantian peraturan- peraturan hukum yang sedang berlaku.

Permenkes Yankestrad Komplementer, belum mengatur secara spesifik mengenai keterampilan dan ramuan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan, sehingga perlu diatur lebih spesifik mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional komplementer. Standar praktik tenaga kesehatan tradisional komplementer belum mengatur secara jelas mengenai pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan kepada klien. Sehingga perlu diatur lebih jelas mengenai standar praktik tenaga kesehatan tradisional komplementer seperti keterampilan, ramuan, pelaksanaan, peralatan dan pedoman pelaksanaan praktik tenaga kesehatan tradisional komplementer yang dilakukan langsung oleh dinas kesehatan. Dengan adanya standar yang jelas maka pelayanan yang didapatkan oleh klien dapat menjaga dan meningkatkan kesehatannya.

Pada perizinan praktik tenaga kesehatan tradisional komplementer juga belum mengatur secara spesifik mengenai jenis pelayanannya. Sehingga diperlukan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dalam praktiknya, seperti adanya

peraturan mengenai kompetensi serta metode-metode untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan-pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah. Pembinaan bertujuan agar tenaga kesehatan memiliki pengetahuan tentang pekerjaannya sesuai ketentuan yang berlaku sesuai dengan kewenangan dengan adanya pembinaan maka tenaga kesehatan akan selalu berhati-hati dalam praktiknya. Pembinaan yang ada dalam peraturan juga belum secara jelas mengatur mengenai tenaga kesehatan. Sehingga perlu diatur secara jelas, tidak hanya pembinaan berupa supervisi tetapi pemeriksaan secara berkala yang dilakukan oleh dinas kesehatan dan penatalaksanaan perawatan terhadap klien. Sehingga tenaga kesehatan dalam melakukan praktiknya terhindar dari kelalaian medis.

Tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian harus dapat mempertanggungjawabkannya, dalam hal ini pihak klien yang rasakan kerugian dapat diidentifikasi siapa yang memiliki kaitan dengan pelayanan kesehatan tersebut. Jika pihak tenaga kesehatan melaksanakan kelalaian serta menjadikan klien merasa rugi, sehingga terlebih dulu hendaknya melihat apakah hal tersebut kesalahan dari tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Tiap permasalahan yang terjadi baik merupakan kesengajaan ataupun tidak sengaja perlu didalami terlebih dulu. Pertanggung jawaban yang ada lantaran terdapat unsur kesalahan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang menjadikan klien merasa rugi.

Bukan hal yang mudah untuk menetapkan jenis kelalaian tenaga kesehatan yang menjadikan seseorang merugi dan menjadi suatu tanggung jawab. Jika terdapat malpraktik maka dapat dilaksanakan klarifikasi lebih dulu termasuk medik atau lainnya. Jika malpraktik medik hendaknya diteliti pula sejauh mana tenaga kesehatan dalam memberi layanan medik yang sesuai dengan standart. Jika tenaga kesehatan sudah melaksanakannya sesuai dengan standart dan tidak terdapat kelalaian dan telah dilaksanakan tugas sesuai dengan bidang kemahiran atau kompetensi yang dimiliki sehingga sulit untuk dinyatakan sebagai malpraktik. Sampai dengan saat ini kedudukan serta peran yang dimiliki tenaga kesehatan yang relative tinggi. Karenanya terdapat perlindungan pada tenaga kesehatan untuk melaksanakan kelalaian, merujuk pada

kenyataan berkenaan dengan pengobatan tradisional yang sudah berkembang di Indonesia, pemerintah memiliki sifat yang tetap dalam melaksanakan binaan.

KESIMPULAN

Tenaga kesehatan tradisional yang diakui oleh pemerintah adalah tenaga kesehatan tradisional yang telah mendapatkan perizinan berdasarkan Permenkes Yankestrad Komplementer. Dimana tenaga kesehatan harus memiliki STRTKT dan SIPTKT. Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional yang selanjutnya disingkat STRTKT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional, yang selanjutnya disingkat SIPTKT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tradisional dalam pemberian pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Praktik mandiri tenaga kesehatan tradisional tidak memerlukan izin penyelenggaraan, dikarenakan izin tersebut melekat pada SIPTKT yang dikeluarkan oleh instansi pemberi izin. Setiap griya sehat harus memiliki izin penyelenggaraan, dimana izin tersebut diberikan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dan izin penyelenggaraan. Griya sehat dapat dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat. Griya sehat yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Griya sehat yang dimiliki oleh masyarakat harus berbadan usaha atau berbadan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Yunus, Wijaya Dinas, Kesehatan Provinsi Bali, and Shofi Khaqul Ilmy. 2022. 'Konsep Terapi Komplementer Keperawatan'
- Ajeng, Nurani, Tri Utami, and Nayla Alawiya. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia*
- Alam, Syifa. 2018. 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TERHADAP MALPRAKTEK PADA PENGOBATAN TRADISIONAL', *Media Iuris*, 1.3 (Universitas Airlangga): 514
- Amperawati, Erny. 2018. 'Perlindungan Hukum Bagi Penyehat Pengobatan Tradisional Empiris Berdasarkan Peraturan Pemerintah 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Semarang'
- Bagiastra, I Nyoman, and I Ketut Sudantra. 2019. 'Bali Dalam Pengembangan Pengobatan Tradisional Komplementer (Kajian Yuridis Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

- Tradisional Komplementer)', *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 2.2 (Universitas Pendidikan Ganesha): 88
- Heriani, Istiana, and Munajah Munajah. 2020. 'Aspek Legalitas Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 11.2 (Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin): 197
- Ifkar, Adriki. 2022. 'Tanggung Jawab Perdata Perawat Atas Kelalaian Dalam Memberikan Pelayanan Keperawatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014'
- Kartika, Anisah. 2019. *Tanggung Jawab Tenaga Layanan Kesehatan Tradisional Terhadap Pasien*
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. 'Penelitian Hukum', *Kencana Prenada*
- Nurhayati, Hadi Siswoyo, Lucie Widowati, Ondri Dwi Sampurno, Delima Delima, and others. 2020. 'Gambaran Griya Sehat Di Indonesia', *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan* (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan): 203–11
- Rarung, Lavenia. 2017. 'Tanggungjawab Hukum Terhadap Pembuat Obat-Obatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan', *Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei*
- Sadewa, Yudha Sukawati, Albertus Sentot Sudarwanto, and Supanto. 2017. *Implementasi Perizinan Pengobatan Herbal Dalam Upaya Kesehatan Masyarakat Di Kota Surakarta*
- Suminah C, and Indradjaja Sisilia. 2020. 'Pelayanan Kesehatan Tradisional Sebagai Alternatif Pengobatan Dan Perawatan Ditinjau Dari Etika Kedokteran Di Indonesia', *Jurnal Usada Nusantara*: 1–6
- Suwito, Candra, Fitri Nelda, and Welli Zulfikar. 2020. 'Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengobat Tradisional Akibat Kelalaiannya Dalam Pelayanan Pasen', *Jurnal Gagasan Hukum*, 02.02
- World Health Organization. 2019. *WHO Global Report On Traditional And Complementary Medicine*